

Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)

Hardianto Hardianto

Universitas Terbuka
hardi66@gmail.com

Tubagus Ismail

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ismailtb@yahoo.com

Muhtar Sapiri

Universitas Bosowa
muhtar.sapiri@universitasbosowa.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine the influence of fiscal decentralization, budget allocation, economic capacity on community welfare, determine the influence of fiscal decentralization on community welfare through budget allocation and economic capacity, determine the influence of budget governance on community welfare through budget allocation and economic capacity in Sulawesi Province West. This research uses a quantitative approach, with a case study of local governments in the West Sulawesi Province which includes six districts. The data collection technique is carried out by document study, using secondary data originating from related agencies or from websites through internet browsing and other documentation. The data analysis technique uses SmartPLS analysis. The findings show that fiscal decentralization has a negative impact on community welfare. Budget governance has a negative influence on community welfare. Budget allocation can influence an increase in community welfare. Economic capacity can improve community welfare. Budget allocation can mediate the effect of fiscal decentralization on community welfare. Economic capacity can mediate the effect of fiscal decentralization on community welfare. Budget allocation cannot mediate the influence of budget governance on community welfare, while economic capacity can mediate the influence of budget governance on community welfare, especially in West Sulawesi Province.

Keywords: *fiscal decentralization, budget governance, budget allocation, economic capacity and community welfare*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat mempengaruhi disparitas daerah. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur secara regional, maupun dalam sumber daya manusia, akan mempengaruhi pencapaian tujuan utama desentralisasi ke daerah. Ketimpangan antardaerah di Indonesia pasca diberlakukannya otonomi daerah disebabkan oleh tingginya kemampuan keuangan antardaerah, di samping alokasi belanja anggaran daerah yang kurang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini

menyedihkan, karena tujuan mulia dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pemerataan. Selain kapasitas keuangan daerah sebagai penyebab disparitas ini, faktor demografis menjadi faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Isu tekanan penduduk menjadi bola salju karena akan menimbulkan pengangguran, masalah kesehatan dan kemiskinan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah sampai saat ini telah berlangsung dalam dua periode; yang pertama tahun 2001 sampai 2003 dan yang kedua tahun 2004 sampai sekarang. Desentralisasi memiliki sejumlah tujuan mulia; satu di antaranya adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan bagi daerah. Kemudian melalui peningkatan kemandirian fiskal diharapkan peningkatan kegiatan ekonomi yang selanjutnya dapat memberikan peningkatan pada kondisi masyarakat yang sejahtera di setiap daerah. Selain daerah berwenang dalam mengelola anggarannya sendiri, desentralisasi juga berarti peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka good governance khususnya di bidang ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Akai & Sakata (2002), teori tentang desentralisasi yang disebutkan oleh Oates berpendapat bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih tinggi daripada sistem terpusat dalam hal penyediaan *service* untuk peningkatan kebutuhan publik, namun pada sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, Akai & Sakata (2002) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih rendah daripada sistem terpusat.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dilihat dari golongan anggaran pokok, antara lain yaitu: kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, serta prasarana dan pelayanan pos lainnya, yang kesemuanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keperluan tersebut dalam mewujudkan cita-cita untuk membangun daerah. Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan (Basri & Munandar, 2009) dapat dilihat bahwa anggaran masih kurang efektif dan efisien untuk hal-hal yang bisa menstimulasi kegiatan perekonomian daerah dan menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dijelaskan Mauro dalam Syukriy & Halim (2006) pengalokasian anggaran sepertinya berkaitan dengan tindakan korup oleh politisi dan birokrasi, contohnya, lebih disukainya pengeluaran yang memiliki peluang untuk tindakan korupsi.

Ditinjau dari segi kesejahteraan masyarakat dengan indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio penduduk miskin, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi yang terjadi di Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 s.d. 2021. Tren perkembangan IPM di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 64,30 pada tahun 2017, meningkat menjadi 65,10 di tahun 2018, kemudian 65,73 untuk tahun 2019, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 66,11 dan

66,36. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, namun angka-angka tersebut masih berada di bawah angka nasional yaitu tahun 2017 sebesar 70,81, tahun 2018 sebesar 71,39, tahun 2019 sebesar 71,92, tahun 2020 sebesar 71,94 dan di tahun 2021 sebesar 72,29. Apabila dipersentasikan, data menunjukkan bahwa persentasi IPM Sulawesi Barat terhadap IPM nasional selama 4 (empat) tahun yaitu dari 2017 s.d. 2020 mengalami peningkatan dengan angka masing-masing secara berurutan adalah 90,81 persen, 91,19 persen, 91,39 persen, dan 91,90 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan ke angka 91,80 persen.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat selama tahun 2017 s.d. 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 11,30 persen, turun menjadi sebesar 11,25 persen tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Sulawesi Barat turun menjadi 11,02 persen dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin turun lagi menjadi 10,87 persen. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin naik menjadi 11,29 persen. Dalam kurun waktu 2020-2021, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen.

Urgensi dalam melakukan peningkatan kapabilitas aparatur daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat saat ini menunjukkan jumlah masyarakat yang belum merasakan manfaat otonomi daerah masih tinggi. Buah terbesar dari otonomi daerah hanya sebatas dirasakan oleh para elit daerah namun belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan yang dapat diterima oleh masyarakat padahal pada hakikatnya tujuan akhir otonomi daerah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Basri & Munandar, 2009).

Kapasitas ekonomi dalam hal ini ditinjau dari dua indikator yaitu pendapatan/pengeluaran perkapita dan tingkat PDRB. Dari sisi pendapatan/ pengeluaran perkapita, secara rata-rata dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat, pendapatan/pengeluaran perkapita dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Data tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 3,70% dibandingkan tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2019 mengalami peningkatan yang lebih kecil dari periode sebelumnya yaitu sebesar 2,22%, dan kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan negatif masing-masing dengan nilai -0,21% dan -0,22%. Apabila ditinjau dari tingkat PDRB, dalam kurun waktu 5 tahun kondisi tingkat PDRB mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,56%, selanjutnya di tahun 2019 meningkat sebesar 6,69%. Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yang meningkat hanya sebesar 0,38%, dan di tahun 2021 kembali melonjak ke angka 8,75%.

Ditinjau dari kondisi ekonomi regional, tahun 2017 secara keseluruhan menunjukkan

perekonomian Sulawesi Barat tumbuh lebih baik dibanding 2016. Ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2017 tumbuh 6,67% (yoy) atau lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 6,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2018 tumbuh 6,23% (yoy) melambat jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,62% (yoy), Perlambatan ekonomi ini menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan terendah di kawasan Sulawesi. Secara tahunan, ekonomi Sulawesi Barat masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional.

Tren perlambatan ekonomi Sulawesi Barat berlanjut hingga triwulan III 2019. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat triwulan III 2019 tercatat 4,67% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 sebesar 4,74% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan IV 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,51% (yoy), Dari perspektif regional, ekonomi kawasan Sulawesi tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,56% (yoy) pada triwulan IV. Hampir seluruh provinsi terpantau mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020, kecuali provinsi Sulawesi Tengah. Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh positif pada triwulan IV 2021. Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,32% (yoy). Dari perspektif regional, perekonomian kawasan Sulawesi tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,73% (yoy) pada triwulan IV 2021.

B. LANDASAN TEORY

Teori Desentralisasi

. Sebagaimana dijelaskan oleh Akai & Sakata (2002), teori tentang desentralisasi yang disebutkan oleh Oates berpendapat bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih tinggi daripada sistem terpusat dalam hal penyediaan *service* untuk peningkatan kebutuhan publik, namun pada sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, Akai & Sakata (2002), menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih rendah daripada sistem terpusat.

Desentralisasi Fiskal

Secara teoritis, Menurut Mardiasmo dalam Putra (2017:7) desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal: (i) mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang lain (horizontal fiscal imbalance); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya; (iv) peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah sehingga tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta (v)

mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Tata Kelola Anggaran

Keberhasilan tata kelola anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terletak pada besarnya anggaran daerah; sebaliknya, hal itu ditemukan dalam tata kelola anggaran yang akuntabel. Transfer fiskal memang dapat meningkatkan sumber pembiayaan bagi daerah, namun belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika kualitas tata kelola dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran relatif rendah. Pengelolaan anggaran yang lebih baik akan meningkatkan kinerja keuangan, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada otonomi daerah (Rahmayati, 2007). Namun, keleluasaan yang lebih besar untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui pajak atau retribusi daerah belum menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Disparitas regional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh penerimaan nonmigas; masalah baru muncul ketika datang ke jumlah penduduk (Sakamoto, 2006).

Alokasi Anggaran

Alokasi berarti menempatkan besaran anggaran pada setiap program dan kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pengalokasian anggaran dalam RAPBD, dilatarbelakangi oleh bagaimana kebijakan umum APBD, yang dicanangkan oleh pemerintah daerah bersangkutan, bicara tentang kebijakan umum APBD, sama artinya, seberapa besar program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja terkait dalam lingkungan pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Satuan Kerja dan unit kerja terkait dalam lingkungan pemerintah daerah, menjabarkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang dituangkan secara lima tahunan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Daerah selama lima tahun, yang dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah yang dibuat pada setiap tahunnya. (Elsye, 2020:2).

Kapasitas Ekonomi

Kapasitas ekonomi berarti jumlah kapasitas pembangkitan yang dimiliki atau dikuasai oleh calon pemasok dengan biaya variabel yang cukup rendah sehingga energi dari kapasitas tersebut dapat disalurkan secara ekonomis ke pasar tujuan. Sebelum menerapkan uji harga yang diberikan, kapasitas

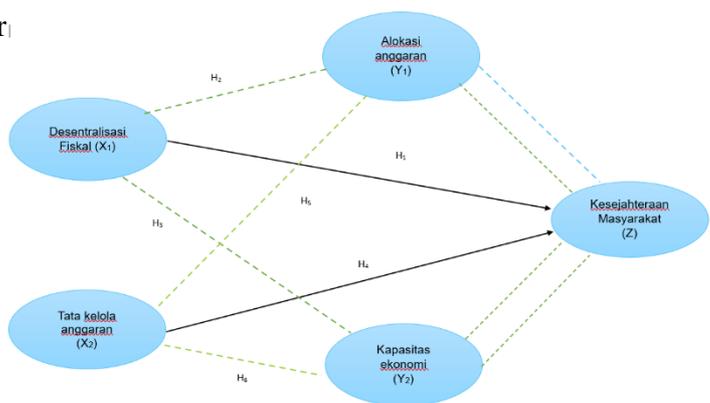
pembangkit yang memenuhi definisi ini harus disesuaikan dengan mengurangi kapasitas yang diberikan berdasarkan kontrak penjualan perusahaan jangka panjang dan menambahkan kapasitas yang diperoleh berdasarkan kontrak pembelian perusahaan jangka panjang (yaitu, kontrak dengan sisa komitmen lebih dari satu tahun). Kapasitas yang terkait dengan penyesuaian tersebut harus diberikan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kapan sumber daya yang dihasilkan tersedia untuk dioperasikan. Kapasitas pembangkit lainnya juga dapat diatribusikan ke pemasok lain berdasarkan kriteria pengendalian operasional jika dianggap perlu, namun pemohon harus menjelaskan alasannya.

Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kerangka Pikir

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penelitian maka dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar



C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan studi kasus pada pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi enam kabupaten. Objek dari penelitian ini adalah implikasi dari desentralisasi fiskal terkait dengan tata kelola anggaran, alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, periode 2017 sampai 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari instansi terkait atau dari website melalui browsing internet dan dokumentasi lainnya berupa berita acara/publikasi, seperti anggaran daerah, laporan pertanggung-jawaban, peraturan daerah dan dokumen anggaran dan pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis partial least squares (PLS). Dua hal yang harus dilakukan di PLS Pertama, penilaian outer model atau model pengukuran adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. Tiga kriteria untuk menilai outer model adalah validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu langkah penting dalam proses penelitian adalah menganalisis uji hipotesis untuk mendapatkan kesimpulan statistik mengenai suatu pernyataan hipotesis. Dalam menguji hipotesis pada penelitian ini, fokus akan diberikan pada evaluasi pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*). Sebelum dilakukan analisis pengujian hipotesis penelitian maka terlebih dahulu akan disajikan hasil koefisien jalur seperti *mean*, *stdev*, *t-values*, dan *p-values* yang akan disajikan melalui tabel :

E. Tabel 4.7

F. Besarnya Nilai Mean, Stdev, t-values dan p-values

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	pvalues
Alokasi Ang-garan -> Kesejahteraan Masyarakat	0.733	0.743	0.207	3.533	0.000
Desentralisasi Fiskal -> Alokasi Anggaran	0.535	0.544	0.197	2.721	0.007
Desentralisasi Fiskal -> Kapasitas Ekonomi	0.499	0.491	0.134	3.736	0.000
Desentralisasi Fiskal -> Kesejahteraan Masyarakat	-0.626	-0.628	0.227	2.763	0.006

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	pvalues
Kapasitas Ekonomi -> Kesejahteraan Masyarakat	0.843	0.834	0.205	4.109	0.000
Tata Kelola Anggaran -> Alokasi Anggaran	0.357	0.323	0.309	1.155	0.249
Tata Kelola Anggaran -> Kapasitas Ekonomi	0.431	0.431	0.108	3.988	0.000

Sumber : Data diolah, 2023

Pembahasan

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, provinsi Sulawesi Barat

Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada provinsi Sulawesi Barat, dimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diindikasikan bahwa dengan desentralisasi fiskal yang tidak dikelola dengan baik dan adanya ketidakpastian kebijakan antar daerah akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah akan menyebabkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.

Penelitian ini diperoleh temuan bahwa tingkat kemandirian fiskal yang tinggi akan mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan lokal tanpa memperhatikan alokasi sumber daya secara keseluruhan. Jika sumber pendapatan lokal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah, terutama di sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik antar daerah.

Kemudian diperoleh dari pengamatan dalam penelitian ini bahwa variasi nilai rasio derajat desentralisasi fiskal ($X_{1.1}$) dan rasio derajat kemandirian fiskal ($X_{1.2}$) di antara observasi-observasi yang mencakup rentang nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari 60.32 hingga 69.71. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa terdapat observasi dengan tingkat desentralisasi dan kemandirian fiskal yang tinggi, namun nilai IPM yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya daerah mungkin tidak optimal. Faktor-faktor lain, seperti ketidaksetaraan distribusi sumber daya, kebijakan lokal yang tidak efektif, atau kondisi

ekonomi regional, juga dapat mempengaruhi variasi dalam nilai IPM.

Penelitian terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yakni seperti yang dilakukan oleh Saputra (2013) penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang penelitiannya dapat diartikan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin kesejahteraan masyarakatnya. Namun pendapat yang dikemukakan oleh pendapat yang dikemukakan oleh *Martinez* dan *McNab* yang dikutip dari jurnal penelitian Saputra (2013) bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong kearah ketidak kestabilan ekonomi makro yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan penelitian ini maka temuan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2013) dan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Martinez* dan *McNab* dalam Saputra (2013).

2. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat

Pembahasan dalam penelitian ini yakni terkait menguji pengaruh langsung tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung tata kelola anggaran memberikan pengaruh yang nyata terhadap adanya penurunan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tidak efektifnya pengelolaan anggaran hal ini dapat dilihat dari rasio SILPA yang menunjukkan bahwa kecurangcermatan dalam penganggaran menjadi bukti tidak terserapnya anggaran yang dikelolah selama ini maka akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat semakin rendah.

Temuan penelitian ini yang diperoleh dari hasil pengamatan dari pengumpulan data di lapangan menjadi indikasi bahwa rasio SILPA yang tinggi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Terlalu banyaknya surplus anggaran yang tidak digunakan secara efektif dapat mengindikasikan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, mengakibatkan kurangnya investasi pada proyek-proyek pembangunan dan program-program

kesejahteraan masyarakat, sehingga hal ini dapat berdampak pada kurangnya dukungan untuk sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Temuan penelitian Djuitaningsih & Oktafani (2011) pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat seperti yang terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan pengamatan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alasannya karena rasio SILPA mencerminkan jumlah kelebihan dana yang tidak digunakan atau dialokasikan dalam suatu periode anggaran, jika rasio SILPA tinggi, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah atau lembaga memiliki surplus anggaran yang tidak dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan dana yang tidak digunakan dapat mengindikasikan ketidakefisienan dalam perencanaan anggaran, di mana sumber daya publik tidak dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dampak negatif dari rasio SILPA yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat juga dapat terlihat dalam kurangnya investasi pada program-program kesejahteraan dan pelayanan publik yang mendukung kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang tidak digunakan secara efektif dapat menyebabkan ketidakcukupan dana untuk proyek-proyek kritis, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan, dan perluasan akses kesehatan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dapat terhambat karena kurangnya dukungan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan esensial. Oleh karena itu, tata kelola anggaran yang tidak efisien dan kurangnya pemanfaatan surplus dana dapat menghambat potensi pembangunan ekonomi dan sosial yang optimal, dengan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dalam penelitian ini yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih & Oktafani (2011).

3. Pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini yakni pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, dimana temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik alokasi anggaran yang ditetapkan untuk membangun pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang diukur dengan rasio belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dievaluasi dengan mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang secara langsung terkait dengan infrastruktur. Data rasio belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat (dinyatakan dalam data Y.1.1 dan Z.1) memberikan gambaran bahwa terdapat variasi dalam tingkat alokasi anggaran untuk infrastruktur di berbagai wilayah atau tahun tertentu.

Melalui pengamatan yang dilakukan terhadap data tersebut maka dapat diperhatikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat bahwa daerah atau waktu dengan rasio belanja infrastruktur yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai IPM yang juga cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara alokasi anggaran untuk infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercermin dalam peningkatan nilai IPM.

Dengan mengukur alokasi anggaran infrastruktur dan menghubungkannya dengan IPM, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terkait dengan membuat kebijakan yang lebih terarah dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan, dapat memberikan dampak positif pada indikator-indikator yang menjadi komponen IPM. Oleh karena itu, mengukur rasio belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan IPM dapat menjadi landasan yang kuat untuk perencanaan anggaran yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Inditiyani & Prasetyo (2022) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa alokasi anggaran dana berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Husen, *et al.* (2023) bahwa alokasi dana tidak ada hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menerima hasil penelitian yang dilakukan oleh Inditiyani & Prasetyo (2022).

4. Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Sulawesi Barat

Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB riil memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB riil maka akan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi dapat secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat alasannya karena dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya tahun, terjadi peningkatan pada nilai pendapatan perkapita yang merupakan rata-rata pendapatan per individu dalam masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan potensi peningkatan daya beli dan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, PDB riil juga menunjukkan tren peningkatan sepanjang waktu, menandakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan menyediakan lebih banyak peluang bagi masyarakat.

Selanjutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat juga tercermin indeks pembangunan manusia. Terlihat bahwa nilai indeks pembangunan manusia cenderung meningkat sepanjang rentang waktu yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan PDB riil berkontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan tren positif pada pendapatan perkapita, PDB riil, dan indeks kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari kapasitas ekonomi, seperti yang diukur oleh data ini, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini yakni Sari *et al.*, (2019), Saputra & Mahmudi (2012) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan yang ditemukan peneliti yang juga dapat membuktikan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita, PDB riil memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2019), Saputra & Mahmudi (2012).

5. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran Provinsi Sulawesi Barat

Temuan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran khususnya pada provinsi Sulawesi Barat dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, alasannya karena pengelolaan dana yang tidak tepat dapat memastikan ketidak efisiensi dan efektivitasnya penggunaan sumber daya.

Desentralisasi fiskal, dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Alokasi anggaran yang baik dapat memastikan bahwa dana desentralisasi digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, melalui mekanisme alokasi anggaran yang efektif, desentralisasi fiskal dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka implementasi dalam penelitian ini bahwa pengelolaan dana yang tidak tepat oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat dapat memastikan tidak terjadinya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan lokal di Sulawesi Barat. Sehingga dengan adanya desentralisasi fiskal maka memberikan otonomi kepada pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola anggaran sehingga hal ini yang menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Ayu, *et al.*, (2020) menemukan bahwa alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial variabel derajat desentralisasi fiskal, sehingga dalam penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Anisya Ayu, *et al.*, (2020).

6. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh kapasitas ekonomi, provinsi Sulawesi Barat

Hasil pengujian mediasi yakni pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kapasitas ekonomi sebagai variabel intervening, dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini dapat diimplementasikan bahwa desentralisasi fiskal dan didukung oleh kapasitas ekonomi seperti pendapatan perkapita yang tinggi dan PDB riil yang dicapai maka akan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kapasitas ekonomi melalui indikator seperti pendapatan per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dimana pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu wilayah, dan dapat memberikan gambaran tentang daya beli masyarakat setempat. Desentralisasi fiskal, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk mengelola sumber daya dan anggaran, dapat mempengaruhi pendapatan per kapita melalui pengelolaan ekonomi lokal yang lebih efektif.

Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi indikator yang relevan dalam mengukur kapasitas ekonomi suatu daerah. PDB mencakup nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, mencerminkan potensi ekonomi dan kontribusi dari sektor-sektor ekonomi yang ada. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat memiliki kontrol lebih besar atas pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB. Peningkatan PDB secara keseluruhan dapat mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pendapatan per kapita dan PDB sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat yang menekankan pentingnya tata kelola ekonomi yang baik di tingkat lokal. Desentralisasi fiskal yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ekonomi lokal, serta kebijakan dan praktik desentralisasi fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, menjadi hal yang

penting dalam memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

7. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh alokasi anggaran provinsi Sulawesi Barat

Hasil pengujian mediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari dari beberapa alasan bahwa terlihat variasi yang signifikan dalam rasio Silpa dengan kisaran nilai antara 60.32 hingga 69.71. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua alokasi anggaran menghasilkan tingkat sisa lebih pembiayaan anggaran yang seragam. Mungkin terdapat perbedaan dalam efisiensi pengelolaan dana di berbagai proyek atau program yang dibiayai.

Kemudian alasan lainnya adalah karena terdapat variasi dalam variabel-variabel rasio kemandirian fiskal dan rasio belanja infrastruktur yang mewakili aspek-aspek tata kelola anggaran. Variabel rasio derajat kemandirian fiskal mencerminkan kebijakan alokasi anggaran, sementara rasio belanja infrastruktur dapat mengindikasikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Perbedaan dalam kombinasi nilai-nilai ini dapat menunjukkan bahwa meskipun ada alokasi anggaran yang besar, tata kelola anggaran yang kurang efektif atau kurang transparan dapat menghambat pengaruh positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

8. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh kapasitas ekonomi pada provinsi Sulawesi Barat

Hasil uji mediasi dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran yang dilaksanakan secara efisien dan efektif akan meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB riil akan dapat mempengaruhi tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kapasitas ekonomi melalui indikator seperti pendapatan per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) riil memiliki peran yang signifikan dalam

memediasi pengaruh tata kelola anggaran dengan rasio sisa lebih pengeluaran anggaran (SILPA) terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita menjadi tolok ukur yang relevan untuk menilai daya beli dan standar hidup masyarakat. Ketika tata kelola anggaran efektif, dengan pengelolaan anggaran yang baik dan penggunaan dana yang tepat sasaran, dapat diperkirakan bahwa pendapatan per kapita akan meningkat.

PDB riil memberikan gambaran yang lebih luas tentang kapasitas ekonomi suatu wilayah dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Peningkatan PDB riil dapat mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dan investasi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah. Sehingga, tata kelola anggaran yang baik dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan PDB riil, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan IPM, yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, memungkinkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi hidup masyarakat. Dengan adanya mediasi seperti pendapatan per kapita dan PDB riil, maka diharapkan dapat mengukur sejauh mana tata kelola anggaran, terutama melalui kontrol rasio SILPA, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan ini membantu mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik tata kelola yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal yang tinggi menyebabkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola anggaran memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola

anggaran yang diukur dengan rasio Silpa yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun di provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran dapat mempengaruhi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, yang menunjukkan bahwa dengan kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB riil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi yang dilihat dari pendapatan perkapita dan PDB riil maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi pada provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada Provinsi Sulawesi Barat.

Saran saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat agar perlu adanya pengawasan secara cermat mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal guna proses pembangunan daerah dapat

lebih terjamin dan terhindar dari penyimpangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Perlunya desentralisasi fiskal secara mandiri guna dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat sehingga berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat.
3. Disarankan agar perlunya pengukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Disarankan untuk penelitian yang akan datang supaya melakukan penelitian dengan subyek penelitian yang beragam misalnya dengan menggunakan beberapa provinsi di Indonesia Timur.
5. Disarankan kepada peneliti yang akan datang agar menggunakan faktor faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan belanja modal seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. S., & Sakata, M. (2002). Desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi: bukti dari data cross-section tingkat negara bagian untuk Amerika Serikat. *Jurnal Ekonomi Perkotaan*, 40(4), 987–1007.
- Alam, K. Z. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerin-tah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kesejahte-raan Masyarakat Studi pada Kabupa-ten dan Kota di Wila-yah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Semarang*.
- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 90–98.
- Anisya Ayu, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Eko-nomi dengan Alokasi Belanja modal sebagai Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(1), 31–44.
- Bahl, R. (2008). Pilar desentralisasi fiskal. *Kertas Kerja CAF No 2008/07, Universitas Negeri Georgia, Atlanta, GA*.
- Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1).
- Cruz, S. (2015). Masa depan alternatif tata kelola global: skenario dan perspektif dari Selatan global, Tinjauan ke masa depan. *Jurnal Ilmu Bisnis*, 17(2), 125–142.

- Djuitaningsih, T., & Oktafani, M. (2011). Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.*
- Husen, sri rahayu, Bidullah, T., & Zakaria, S. (2023). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bonggan. *Jurnal Ilmiah Produktif, 11(1)*, 1–6.
- Inditiyani, A., & Prasetyo, N. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1)*, 15–23. <https://doi.org/e-ISSN 2829-9051>
- Isdijoso, B., & Wibowo, T. (2012). Analisis kebijakan fiskal pada era otonomi daerah, studi kasus: sektor pendidikan di Kota Surakarta. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 1(6)*, 22–56.
- Kalnadi, D. (2013). *Pengukuran Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Pada UMKM Dengan Menggunakan Metode UTAUT*. Universitas Lampung.
- Kuncoro, M. (2044). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1)*, 47–63.
- L Anisya Ayu, Rahayu, & Junaidi. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 5(1)*, 31–44.
- Mourmouras, A., & Rangazas, P. (2009). Kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. *Dinamika Makroekonomi, 13(4)*, 450–476.
- Oates, W. (1972). *Fiscal federalims*. New York: Harcourt Brace.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal, 46(2)*, 237–243.
- Oates, W. (1999). An Essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature, 37(3)*, 1120–1149.
- Omolehinwa, E. . (2012). Akuntansi Uang Rakyat, di dalam Seri Kuliah Perdana University of Lagos 2012. *Pers Universitas Lagos, Lagos, 2012.*
- Permana, A., Rustamunadi, R., & Sunardi, D. (2019). Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Periode 2012-2016. *Tazkiya, 20(01)*, 01–21.
- Pranata, A. (2011). *Mengurai Model Kesejahteraan Petani*.
- Purbadharmaja, M. A. (2017). *The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare*. Foresight.
- Putra, F. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014). *Jurnal Universitas Negeri Padang.*
- Sabilla, J. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 15(1)*, 12–22.
- Saputra, B. (2013). Pengaruh Desentra-lisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekono-mi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator, 9(1)*.

- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *JAAI*, 16(2), 185–199.
- Sari, Catur Nanda Puspita Sari, Jumiati, A., & Muslihatiningsih, F. (2019). Analisis pengaruh inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau jawa 2006-2016. *Jurnal Ekonomi Equilibrium*, 3(1), 45–60.
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 1–21.
- Seo, J. (2009). Strategi pembangunan nasional yang seimbang: pembangunan kota inovasi di Korea. *Kebijakan Penggunaan Lahan*, 26(3), 649–661.
- Suprayitno, B., Mustofa, Suyanto, Kusumawardhani, N., Rohman, A. F., & Suryawardhana, S. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Laporan Penelitian Research Group*.
- Syukriy, A., & Halim, A. (2006). Studi belanja modal pada anggaran pemerintah daerah atas dengan belanja pemerintah dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2).
- Tadjoeddin. (2001). Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia. *Working Paper: 01/01-1, United Nation Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta*.
- United Nations Development Programme (1995) Human Development Report 1995, Published for United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
- Utomo, S. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 89-98.
- Thornton, J. (2007). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dipertimbangkan kembali. *Jurnal Ekonomi Perkotaan*, 61(1), 64–70.
- Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 55–83.
- Willy, A., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (Pertama)*. Yogyakarta: Andi.
- World Bank. (2013). World Development Report 2013: Jobs. Diakses dari: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843>.
- Yuliani, T. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur. *Journal of Economics and Policy*, 45-53.
- Zulhibri, M., Naiya, I. dan Ghazal, R. (2015), “Perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang terpilih”, *Jurnal Internasional Masalah Pembangunan*, Jil. 14 Nomor 2.